

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Reformasi sistem pemilihan pemimpin publik yakni kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Sebelum berlakunya undang-undang ini kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun dengan adanya undang-undang tentang otonomi daerah maka kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada) mempunyai tujuan, salah satunya adalah untuk mendekatkan sosok pemimpin lokal kepada masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik yang lebih maksimal.

Pilkada merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokrasi di tingkat lokal. Pemilihan kepala daerah bisa dimaknai bahwa demokrasi ditingkat nasional akan tumbuh dan berkembang dengan mapan atau dewasa, apabila pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi berakar dengan baik terlebih dahulu. Seperti diungkapkan Hairus dkk dalam Lestari (2011:17), demokrasi ditingkat lokal akan bergerak kearah yang lebih baik apabila tatanan, instrumen, dan konfigurasi kearifan serta kesatuan politik lokal terlebih dahulu dibentuk.

Membahas tentang pilkada tidak terlepas dengan bagaimana seorang Gubernur dipilih secara langsung oleh masyarakat, baik dengan melakukan pemilihan umum ataupun dengan penetapan seperti yang di lakukan masyarakat Yogyakarta yaitu

masyarakat menghendaki Sultan sekaligus sebagai Gubernur tanpa melakukan pemilihan umum. Pemilihan Gubernur secara langsung ataupun melalui penetapan mempunyai konsekuensi masing-masing, tidak terlepas dari untung atau rugi melakukan pemilu secara langsung ataupun penetapan. Begitu pula dengan pemilihan Gubernur secara langsung yang dilakukan di Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2013. Pemilihan Gubernur ini dilakukan untuk kedua kalinya oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat yang sebelumnya pernah dilakukan pada Tahun 2008 lalu.

Muhammad Zainul Majdi MA (Tuan Guru Bajang) atau sering dipanggil TGB adalah Gubernur pertama Nusa Tenggara Barat yang dipilih secara langsung oleh masyarakat dan menduduki kursi orang nomor satu di NTB dari Tahun 2008-2013, dan kembali mencalonkan diri menjadi Gubernur untuk masa jabatan 2013-2018. TGB adalah tokoh dari organisasi kemasyarakatan yang bernama Nahdlatul Wathan (NW). Terpilihnya TGB menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat selain membuktikan mengakarnya Nahdlatul Wathan di NTB, juga memperlihatkan pergeseran acuan pemilih kepada tokoh muda dan tokoh nasionalis Islam (Rahayu, 2013:4).

Nahdlatul Wathan (NW) adalah organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Majid atau sering dipanggil Maulana Syeh (kakek TGB) yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1953. Nahdlatul Wathan merupakan ormas paling besar di Nusa Tenggara Barat, NW yang merupakan ormas sejak pemilu 1955 memang merupakan pendukung Masyumi. Selama puluhan Tahun sejak berdirinya, NW telah melakukan proses pencerahan umat Islam di Lombok.

Nahdlatul Wathan diterima, didukung, dan menjadi tumpuan harapan hampir seluruh umat Islam di Nusa Tenggara Barat pada umumnya dan umat Islam di Lombok secara khusus. Sampai era 1980-an, Maulana Syeh dan Nahdlatul Wathan praktis tidak menunjukkan ketertarikan politik yang secara khusus. Keputusan Maulana Syeh untuk mendukung Golkar pada Tahun 1971, lebih disebabkan alasan ideologis daripada alasan politis karena hanya Golkar yang ketika itu mampu membendung arus komunisme (Rahayu, 2013:6).

Maulana Syeh memutuskan keluar dari Golkar pada Tahun 1982 dikarenakan kekecewaan mayoritas umat Islam di Indonesia terhadap Orde Baru yang semakin didominasi militer yang represif terhadap umat Islam (Ma'ruf, 2008:1-3). Baru pada Tahun 1987 ketika memutuskan kembali ke Golkar, itulah pertama kali beliau mengambil sebuah keputusan politik. Sejak saat itu, meskipun Nahdlatul Wathan tetap diperhitungkan sebagai sebuah kekuatan sosial, namun mulai lebih diperhitungkan sebagai sebuah struktur politik informal. Transformasi evolusi Nahdlatul Wathan dari gerakan sosial menjadi gerakan politik semakin jelas ketika konferensi wilayah Nahdlatul Wathan secara resmi mencalonkan TGH. Muhammad Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang) menjadi calon Pemimpin Nusa Tenggara Barat pada pilkada 2008, dengan dicalonkannya TGB menjadi Gubernur semakin memperjelas keterlibatan NW dalam ranah politik. Nahdlatul Wathan beranggapan bahwa dakwah tidak hanya lewat mendirikan madrasah dan mengajar majelis taqlim tetapi juga harus melalui politik karena politik adalah ladang dakwah, di mana dakwah memasuki kekuasaan lebih efektif, karena jangkauan dan otoritasnya yang besar, dan juga dalam ajaran Islam, tidak hanya sebatas

tentang agama tetapi semua aspek kehidupan baik agama, Negara, dan politik, dan salah satu fungsi dari manusia adalah sebagai khalifah (pemimpin) di bumi Allah. (Rahayu, 2013), oleh karena itu, Nahdlatul Wathan saat ini dikenal sebagai organisasi keagamaan, pendidikan, politik dan sosial kemasyarakatan. (Fahrurrozi, 2011).

Kendaraan politik pencalonan pertama TGB menjadi Gubernur Tahun 2008, di dukung oleh Partai Bulan Bintang (PBB) dan partai keadilan sejahtera (PKS) untuk maju menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan calon wakil Gubernur Ir. H. Badrul Munir yang merupakan politisi dari PKS. Setelah menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat, pada Tahun 2010 TGB merubah haluan politiknya dengan bergabung bersama Partai Demokrat.

TGH M. Zainul Majdi atau yang lebih dikenal dengan TGB itu juga merupakan Pemimpin Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Wathan (NW), karena setelah kakeknya (Maulana Syeh) wafat amanah untuk meneruskan NW dipegang oleh M Zainul Majdi MA (TGB). Kegiatan yang dilakukan Nahdlatul Wathan dan TGB adalah memberikan pengetahuan pada masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat, yaitu dengan cara melakukan dakwah untuk menyebarkan agama Islam.

Pengaruh NW terhadap terpilihnya TGB menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat dapat dilihat dari hasil pemilihan umum yang dilakukan pada Tahun 2008, dimana TGB di tetapkan sebagai Gubernur NTB karena berhasil mendapatkan suara tertinggi dan mengalahkan saingannya dalam pilkada NTB. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat diperoleh data bahwa pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang

memperoleh suara terbanyak adalah pasangan calon Tuan Guru Bajang KH. M. Zainul Madjdi, MA. dan Ir. H. Badrul Munir, MM. dengan perolehan suara sebanyak 847.976; atau 36,72% suara dan suara terbanyak diperoleh dari Kabuapten Lombok Timur sebesar 306.045 suara. Sedangkan pada Tahun 2013 hasil perolehan suara yang didapatkan oleh TGB dengan pasangannya H. Amin sebesar 1.038.642 atau 44.36% suara. Jika dianalisis jumlah suara yang didapatkan TGB pada pilkada 2008 dan 2013 lalu lumayan berbeda yaitu sekitar 7,64% atau sekitar 190.666 suara, hal ini menunjukkan jumlah pemilih yang memilih TGB pada pilkada 2013 semakin meningkat. Berdasarkan hasil perolehan suara yang didapatkan TGB pada tahun 2013, maka TGB dinyatakan menang pada pilkada 2013 dan menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2013-2018. Di pulau Lombok, pasangan TGB bisa dikatakan menang hampir disemua Kabupaten. Jumlah suara tertinggi didapat oleh pasangan TGB-Amin di Kabupaten Lombok Utara. Di Kabupaten Lombok Utara inilah TGB-Amin mendapatkan suara tertinggi sebesar 72%, sedangkan di Kabupaten Lombok Timur yang menjadi basis Nahdlatul Wathan sebesar 324.028 atau 52,92% suara atau berada di posisi kedua setelah Kabupaten Lombok Utara.

Penelitian ini dilakukan untuk lebih memperdalam kajian penulis tentang Nahdlatul Wathan dalam politik lokal Nusa Tenggara Barat khususnya di Kabupaten Lombok Timur, karena terlebih dahulu penulis pernah meneliti tentang Pengaruh NW Terhadap Kemenangan TGB pada Pilkada 2008, dimana penelitian tersebut dilihat dari konteks jamaah yang dimiliki oleh NW, dimana masyarakat masih sangat memegang budaya *paternalistic* khususnya pada keluarga NW, dimana keturunan TGH. Zainuddin Abdul Majid (Maulana Syeh) masih sangat dihormati,

disegani dan dikeramatkan karena dianggap sebagai pewaris nabi “*warasat al ambiya*” oleh masyarakat. Disamping itu, faktor kharismatik dan *geneologis* yang dimiliki oleh TGB sendiri. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini membahas tentang cara atau strategi yang dilakukan NW untuk memenangkan TGB pada pilkada 2013.

Sesuai dengan paparan data di atas dapat dilihat bagaimana organisasi NW berpengaruh sehingga kemenangan TGB sangat di rasakan khususnya di Pulau Lombok baik pada pilkada 2008 ataupun 2013. Oleh sebab itu, penulis dalam hal ini ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai bagaimana “Strategi Nahdlatul Wathan dalam Memenangkan Tuan Guru Bajang pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Nusa Tenggara Barat Priode Tahun 2013”.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka pernyataan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Strategi Nahdlatul Wathan dalam Memenangkan Tuan Guru Bajang pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Nusa Tenggara Barat Priode Tahun 2013-2018?”

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana potret politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013, yang dimenangkan oleh pasangan TGB. KH. Zainul Madji dan H. Moh. Amin. Sedangkan secara khusus, penelitian ini ingin menjangaji strategi Nahdltul Wathan dalam Memenangkan kembali Tuan Guru

Bajang (TGB) pada pertarungan politik dalam pilkada langsung di Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 lalu.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Sementara manfaat dari penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis maupun praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari segi teoritis diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah khazanah pustaka yang memfokuskan penelitian di bidang Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan dinamika yang muncul di dalamnya.

##### 1. Manfaat Praktis

Manfaat dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas bagi peneliti sendiri, ataupun sebagai bahan kajian bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai Pemilihan Kepala Daerah, dan juga sebagai saran ataupun masukan dalam meningkatkan kualitas pemahaman mengenai strategi dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah.